

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diperkirakan, sampai beberapa kali pemilu kedepan, di Indonesia akan senantiasa diikuti oleh banyak kontestan partai politik. Dalam kondisi seperti itu, para pemilih tak akan mampu mengingat begitu banyak nama partai, proses awal terpenting sebelum pemilih menentukan pilihannya. Konon lagi untuk untuk mengetahui program-program utama dan nama-nama para kandidat yang ditawarkan suatu partai. Dengan demikian, mayoritas partai-partai yang ikut pemilu itu akan sulit dikenali pemilih, apalagi membedakan dengan partai lain.¹

Hal itu cukup beralasan mengingat partai-partai politik tidak mudah mencapai sasaran obyektif (target suara atau kursi) dengan cara-cara kampanye dan kegiatan kehumasan konvensional. Tantangan besar khususnya akan dihadapi partai politik khususnya partai baru. Tanpa langkah terobosan, partai-partai akan sulit meraih suara, bahkan hanya sekadar untuk dikenal baik oleh para konsituen. Langkah-langkah terobosan itu hanya bisa dilakukan dengan strategi yang jitu, termasuk menerapkan *political marketing* untuk menghadapi momen suksesi-suksesi ditengah persaingan yang ketat.

¹ Adman Nursal, 2004, *Political Marketing Pemilu : Strategi Memenangkan Pemilu :- Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hal. 10

Untuk mendapat tiket kearena pemilu, sebagian partai sebenarnya sudah dihadang oleh tantangan serius. Undang-undang tentang partai politik menghendaki partai-partai yang berbasis kuat saja yang lolos ujian kualifikasi sebagai partai politik yang dapat mengikuti Pemilu. Persyaratan yang harus dipenuhi akan mempersulit partai-partai untuk diakui sebagai parpol yang berhak untuk ikut Pemilu. Salah satu syarat yang memberatkan itu, misalnya tentang keharusan memiliki sejumlah cabang partai pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Banyaknya kontestan pemilu yang akan bersaing, ini mempersulit bagi tiap-tiap partai politik dalam membentuk ciri khas partai politik baik dari segi *platform* maupun ideologi. Makin sempitnya ruang strategis yang dimiliki tiap-tiap partai politik menuntut bagi kecerdikan partai politik dalam membangun *positioning* (menempatkan seorang kandidat atau partai politik dalam pikiran pemilih), sehingga memberikan nilai khas dibanding partai lain.

Persaingan yang semakin ketat dan kompleks mengingat pada pemilu yang menggunakan teknis untuk memilih tanda partai dan nama calon legislatif, sehingga kampanye politik menghadapi pemilu tidak hanya membangun *positioning* partai politik akan tetapi para kandidat juga dituntut harus

Sebenarnya partai politik dapat membangun *image* kepada masyarakat melalui sebuah fungsi dan peran-peran partai politik yang melekat padanya, fungsi pengkaderan (*recruitmen*), kontrol, pendidikan, pengatur konflik dan lain-lain ini dapat memberikan citra positif di mata masyarakat, sehingga tidak terkesan bahwa partai politik muncul dan hadir pada waktu momen suksesi pemilu saja, sehingga ketika menghadapi pemilu partai politik kelabakan harus membangun citra atau *image* pada masyarakat, tidak jarang terjadi klaim sepihak atas keberhasilan sebuah kebijakan. Lihat saja beberapa waktu lalu terjadi polemik klaim Partai Demokrat akan kebijakan atas turunnya harga BBM dan penurunan tingkat kemiskinan. Saya kira ini tidak perlu terjadi kalau partai politik menjalankan fungsi dan perannya secara benar, sehingga untuk mengangkat isu kepada masyarakat partai politik tidak gagap dan punya alternatif isu atas peran yang dia lakukan.

Reformasi tentunya memberikan lahan baru bagi tumbuhnya partai politik baru, kebebasan dalam partisipasi politik semakin terbuka lebar dimana selama ini dikekang oleh kebijakan rezim orde baru. Kebebasan dalam berserikat dan berkumpul yang diamanahkan UUD 1945, dimanfaatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk juga membentuk partai politik, sehingga pemilu pertama kali di era reformasi pada tahun 1999 sudah diikuti 48 kontestan partai politik, pemilu berikutnya tahun 2004 juga diikuti 24 partai

sumbangsih bagi lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang di pimpin Dr H. Amien Rais dan ditopang oleh tokoh-tokoh lainnya. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai reformis yang lahir dari rahim reformasi yang tampil menjadi kontestan pertama kali pada pemilu 1999 memberi gebrakan dunia perpolitikan Indonesia. Lahir karna kondisi bangsa Indonesia kian semrawut dan menyisakan banyak masalah yakni diantaranya hukum, sistem politik, KKN, bangunan ekonomi yang rapuh sehingga menimbulkan kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai persoalan yang menuntut bagi penyelesaiannya. Reformasi merupakan ikhwal bagi mimpi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih demokratis.

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK, Muhammadiyah, dan Kelompok Tebèt. Partai ini lahir sebagai partai terbuka, plural, nonsektarian, dan nondiskriminatif, mencoba memberikan alternatif pembangunan bagi bangsa Indonesia ditengah akumulasi kekecewaan masyarakat akan kondisi bangsa Indonesia PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, mantan Ketua umum Muhammadiyah, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya.

Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat

membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selibuhnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif, untuk terwujudnya Indonesia baru.²

Melihat sepak terjang, hingga Partai Amanat Nasional dapat tumbuh dan berkembang, tidak bisa dilepaskan dengan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yakni Muhammadiyah, yaitu ormas islam terbesar di Indonesia yang sebenarnya tidak memiliki hubungan organisatoris maupun fungsionalis dengan PAN. Akan tetapi sosok seorang Dr. H. M. Amien Rais yang pernah menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah hasil Mukhtamar ke 43 di Banda Aceh tahun 1995, menjadikan Amien Rais bukan saja sebagai tokoh Muhammadiyah akan tetapi sebagai tokoh bagi bangsa Indonesia, apalagi kritik-kritik yang dilontarkan beliau terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang otoritarian, terutama praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pelanggaran HAM, ini dinilai cukup berani. Sehingga Dr. H. M. Amien Rais diakui sebagai tokoh bangsa sekaligus sebagai tokoh reformasi.

² http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional

Inilah awal bagi terbentuknya Partai Amanat Nasional, yang tidak bisa dilepaskan dari Ormas Islam yakni Muhammadiyah, yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1912 Miladiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Keterikatan ini dikarnakan bukan saja karna Amien Rais pernah menjabat sebagai pimpinan Muhammadiyah akan tetapi terbukti bahwa besarnya Partai Amanat Nasional ternyata tidak bisa dilepaskan oleh fasilitas-fasilitas yang diberikan Muhammadiyah bagi terbentuknya basis PAN hingga tersebar ke berbagai daerah-daerah dengan menggunakan kader Muhammadiyah.

Juga ketika dikaitkan dengan "suasana psikologis" pada sejarah awalnya, berdirinya PAN memang tidak bisa lepas dari Amien Rais. Sedangkan posisi Amien Rais tidak bisa lepas dari Muhammadiyah. Seperti pernah diungkapkan Amien Rais sendiri, tanpa seizin Muhammadiyah, sebagai ketua Muhammadiyah dia tidak mungkin bisa memimpin PAN. Artinya, tak sepenuhnya salah jika ada yang berpendapat bahwa, jika NU yang melahirkan PKB, maka Muhammadiyah adalah yang melahirkan PAN. Ilustrasi ini menunjukkan betapa keberadaan PAN tidak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah. Apalagi, secara simbolis pun ada kesamaan, seperti tercermin dalam lambangnya yang sama-sama gambar matahari.³

³Deni al-Azhar, <http://kita.jogja.org/detail.php?ID=992&cat=Artikel>, 24.10.2008.

Banyaknya kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang berasal dari kalangan Muhammadiyah ini memberikan indikasi bahwa partai ini juga menggunakan fasilitas Muhammadiyah untuk menggalang massa sehingga partai amanat nasional kian besar dan berkembang (lihat Tabel 1.1 dan 1.2) : Perbandingan hasil perolehan suara PAN pada pemilu 1999 dan 2004.

Bisa dikatakan cepat dan berkembang, melihat Partai Amanat Nasional yang lahir era reformasi dan tercatat baru mengikuti dua kali pemilu yakni pemilu 1999 dan 2004 akan tetapi partai ini cukup dikenal dan punya akar rumput (*grass root*) di hampir seluruh daerah di Indonesia.

TABEL : 1.1
PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PAN PADA PEMILU 1999 DAN 2004

No	Nama Partai	PEMILU 1999			PEMILU 2004		
		Jumlah Suara	%	Kursi	Jumlah Suara	%	Kursi
1	PDI-P	36.689.073	33,76	153	21.026.629	18,53	109
2	Golkar	23.741.749	22,46	120	24.480.757	21,58	128
3	PPP	11.329.905	10,72	58	9.248.764	9,15	58
4	PKB	13.336.982	12,62	51	11.989.564	10,57	52
5	PAN	7.528.956	7,12	34	7.303.324	6,44	52
6	PBB	2.049.708	1,94	13	2.970.487	2,62	11

Sumber: Di olah dari data KPU Pusat

Dari dua perbandingan perolehan suara PAN pada pemilu 1999 dan 2004 diatas, PAN memang mengalami penurunan perolehan suara sebesar 225.632

mengalami peningkatan perolehan jumlah kursi, dari 34 kursi pada pemilu 1999 menjadi 52 kursi pada pemilu 2004.

Adapun perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu 1999 dan 2004 DIY adalah sebagai berikut :

TABEL : 1.2
PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PAN PADA PEMILU 1999 DAN 2004 D.I YOGYAKARTA

NO	NAMA PARTAI	PEMILU 1999		PEMILU 2004	
		JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%
1	PDI-P	643.202	35,65	465.061	26,30
2	PAN	311.619	17,27	328.240	18,57
3	GOLKAR	258.745	14,34	245.166	13,87
4	PKB	257.240	14,26	183.097	10,36

Sumber: Di olah dari data KPUD DIY

Dari dua perbandingan PAN mengikuti pemilu, yakni pemilu 1999 dan 2004 di DIY, dapat dilihat prosentase perolehan suara PAN mengalami peningkatan dari 17,27% menjadi 18,57% (meningkat sebanyak 1.3%).

Melihat perbandingan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) antara pemilu 1999 dan 2004, menunjukkan ada sebuah peningkatan perolehan suara pada pemilu 2004 baik pada tingkat nasional maupun DIY Yogyakarta. Artinya bukan tidak mungkin bahwa PAN slalu bekerja keras meningkatkan

(menempatkan seorang kandidat atau partai politik dalam pikiran pemilih) pada pemilu 2009 nanti.

PAN yang mengambil posisi menjadi kekuatan politik yang memperjuangkan reformasi konstitusi di MPR, untuk perbaikan sirkulasi pemerintahan mendatang. Meskipun telah dipublikasikan secara luas oleh media massa, getaran-gerakan reformasi yang mengubah wajah Indonesia ini diterima oleh daerah dengan frekuensi berbeda-beda. Bagi masyarakat kota, getaran reformasi lebih kuat menggema, dirasakan, dan mempengaruhi perubahan dibandingkan masyarakat desa. Sedangkan di Yogyakarta masyarakat terlihat lebih apresiatif terhadap hadirnya PAN, ditengah masyarakat bingung untuk menentukan alternatif bagi arah reformasi kedepan. Sehingga Yogyakarta yang mayoritas masyarakatnya berpendidikan (terdapat berbagai institusi pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi) dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga menjadikan masyarakat jogja rata-rata sebagai pemilih rasional dan emosional karna kedekatan kader Muhammadiyah dengan tokoh partai PAN.

Sambutan yang cukup apresiatif masyarakat Jogjakarta terhadap hadirnya Partai Amanat Nasional terlihat dari dua kali pemilu pada tahun 1999 dan 2004 PAN mendapat perolehan kursi yang cukup membanggakan di DIY, PAN sebagai partai pendatang baru mampu bersaing dengan partai politik besar yang sudah

Perolehan kursi urutan kedua merupakan sebuah prestasi dan pukulan bagi partai lainnya.

Ada sebuah ketertarikan penulis melihat Partai Amanat Nasional yang terbilang baru dan tercatat dua kali mengikuti pemilu akan tetapi mampu tampil menjadi pesaing-pesaing partai yang terbilang besar dan sudah lama yakni diantaranya PDI-P, Golkar, PPP, dan tidak mustahil PAN juga mampu memperoleh posisi teratas pada pemilu-pemilu mendatang.

Bagaimana PAN dapat memanfaatkan peluang-peluang dan menerapkan strategi kampanye untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2009 nanti? Kalau pada pemilu 1999 dan 2004 PAN D.I Yogyakarta menggunakan metode kampanye *door to door* dan pengajian masyarakat dengan mengangkat isu reformasi sebagai titik persoalan, serta menggunakan ketokohan Amien Rais, apakah sekiranya metode ini masih relevan sehingga butuh perubahan yang radikal.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari penjelasan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah adalah : Bagaimana strategi kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memanfaatkan suatu peluang untuk meningkatkan hasil perolehan

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap momen suksesi pemilu khususnya di Indonesia, salah satu hal yang menarik kita amati adalah bagaimana partai politik membaca peluang dan memanfaatkan peluang tersebut menjadi sebuah keunggulan kompetitif maupun komparatif. Yang nantinya dapat disusun dalam sebuah strategi untuk memperoleh peluang tersebut.

Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk membahas bagaimana Partai Amanat Nasional khususnya DIY dalam memanfaatkan peluang dengan meracik strategi yang jitu bagi peningkatan perolehan suara pada pemilu mendatang.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang partai politik, khususnya DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan strategi kampanye untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2009 ini.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi Partai Amanat Nasional (PAN), akan strategi kampanye bagi yang diimplementasikan Partai Amanat Nasional bagi peningkatan perolehan suara pemilu legislatif 2009 ini. Sehingga dapat

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori diharapkan menjadi sebuah acuan secara konsep yang nantinya dapat digunakan dalam melihat dan menganalisis dengan sebuah permasalahan. Kerangka teori juga dapat menjadi bahan komparasi akan konsep yang ada dengan sebuah kondisi riil yang nantinya selain juga untuk menganalisis suatu permasalahan, akan tetapi juga mencari suatu keidealan dan melahirkan konsep yang lebih matang dan baik. Adapun kerangka teori pada permasalahan ini adalah :

a. Strategi.

Kenali musuh, kenali diri sendiri, maka kemenangan tidak akan terancam. Kenali lapangan, kenali iklim, maka kemenangan akan lengkap⁴.

Ada keteraturan dalam ketidakteraturan. Begitu kata ahli matematika dan fisika. Ada pola yang sama pada suatu struktur dalam skalanya yang kecil ataupun besar. Juga masih kata matematikawan dan fisikawan teori. Pun dalam sejarah. Ada pola dalam ragam peristiwa sepanjang ingatan manusia yang tampaknya acak itu. Pola itulah yang kemudian membentuk hukum-hukum sejarah. Sejarah digali agar bisa berulang, dan pula agar tidak lagi pernah terjadi. Dalam kehidupan politik bangsa kita, sayangnya jadi tidak sama

lagi sejak Reformasi Mei 1998. Terutama setelah orang-orang bisa relatif sangat bebas mendirikan partai.⁵

Tahun ini merupakan tahun persiapan menuju pemilu 2009, masa krusial pembentukan citra partai, politisi dan kandidat. Tahun ini akan menjadi musim semi kebijakan populis yang menjadi instrument untuk melakukan *incumbent*. Akan tetapi, kebijakan populis tersebut akan menuntut biaya tinggi, sedangkan dana tidak tersedia secara leluasa.

Memori pemilih di Indonesia cenderung pendek, sehingga dua tahun menjelang pemilu bagi pemerintah dan partai politik merupakan fase paling krusial. Aktivitas oposisi akan meningkat dan menjadi tren karena dipandang strategis untuk mengumpulkan modal politik bagi pemilu 2009. Politisi akan kembali memperkuat partainya, sehingga partai menjadi faktor terpenting dalam pengambilan kebijakan publik.

Kemudian yang sangat penting berikutnya adalah strategi yang dibangun partai politik untuk mempengaruhi pasar politik yang terdiri atas tiga bagian yaitu: Pemilik Kelompok berpengaruh (*influencer groups*) dan

Glueck menyatakan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Robert M. Grant mengemukakan, bahwa strategi dapat dirumuskan sebagai memadukan tema pokok yang memberikan koherensi serta arah tindakan dan keputusan suatu organisasi. Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mengeksploitasi kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Sedangkan Kompetensi Inti merupakan sumberdaya dan kemampuan yang telah ditentukan sebagai sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan terhadap pesaingnya, (Michael A. Hitt, I. R. Ireland dan R. E. Hoskisson).

Dari pengertian diatas strategi dapat didefinisikan sebagai rencana untuk tindakan demi mencapai tujuannya. Karena merupakan sarana maka strategi diharapkan dapat menjawab tantangan dan merebut peluang yang ada melalui persaingan yang semakin kompetitif dengan berbagai keunggulan yang dimiliki suatu organisasi partai politik.

Guna mencapai tujuan jangka panjang dan antara, partai politik

menengah. Strategi partai dapat dibedakan dapat dibedakan dalam beberapa hal⁶ :

- a) Strategi yang terkait dengan penggalangan dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini publik ataupun selama periode pemilihan umum. Strategi ini penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara yang mendukung kemenangan suatu partai politik ataupun kandidat yang diusungnya. Melalui kemenangan suara, suatu partai politik ataupun kandidatnya akan dapat mengarahkan kebijakan politik dinegara bersangkutan agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita, sehingga bentuk dan struktur masyarakat ideal yang diinginkan akan dapat diwujudkan.
- b) Strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain. Cara ini dimungkinkan sejauh partai yang akan diajak berkoalisi itu konsisten dengan idiologi partai politik yang mengajak berkoalisi dan tidak hanya mengejar tujuan praktis, yaitu memenangkan pemilu, pemilihan partai yang diajak berkoalisi perlu mempertimbangkan *image* yang akan ditangkap oleh masyarakat luas.
- c) Strategi partai politik dalam mengembangkan dan meberdayakan organisasi partai politik secara keseluruhan, mulai dari strategi

⁶ Firmanzah 2008 : *Mengelola Partai Politik : Komunikasi Dan Positioning Ideology Politik Di Era*

penggalangan dana, pemberdayaan anggota dan kaderisasi, penyempurnaan mekanisme pemilihan anggota serta pemimpin partai, dan sebagainya.

- d) Partai politik membutuhkan strategi umum untuk bisa terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti peraturan pemerintah, lawan politik, masyarakat, LSM, pers, dan media serta kecenderungan-kecenderungan di level global.

Strategi diatas adalah strategi untuk mencapai sebuah tujuan partai politik yang telah ditetapkan, ideologi partai adalah sebagai arah penjabaran gerak organisasi termasuk strategi.

Tingkat persaingan antar partai politik tidak bisa dihindarkan lagi pada momen-momen suksesi pemilu, apalagi dengan hadirnya pers yang terbuka dan transparan ini menuntut partai politik harus bekerja ekstra serta memonitoring dan mengevaluasi setiap aktifitas dan strategi partai lain. Hanya mengandalkan konsituen dan pendukung tradisional tidak menghantarkan partai menjadi pemenang. Perlunya partai politik yang agresif dan aktif dalam berburu suara dengan merebut dan mengambil kantong-kantong suara lawan politik. Manuver politik mempengaruhi tingkat perolehan dukungan dan perlunya kewaspadaan terhadap tekanan pesaing. Perlunya penerapan strategi

yang mampu kesesuaian kebutuhan masyarakat hari ini dengan mengkaji

struktur dan kondisi masyarakat, yang nantinya diharapkan ada kesesuaian antara strategi dan kondisi masyarakat. Sehingga efektifitas strategi tersebut bisa terukur.

Dalam sistem persaingan yang dinamis, setiap aksi akan dibalas oleh pihak lain dalam bentuk reaksi. Hal itu tentu saja menyulitkan untuk dapat memastikan keberhasilan strategi yang dipakai. Keberhasilan strategi politik tidak hanya ditentukan oleh internal partai, tetapi juga sangat ditentukan oleh reaksi partai lain. Sehingga tekanan berikutnya bagi partai politik adalah tekanan untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas dan efektifitas strategi dan manuver politiknya. Pada kenyataannya, pesaing juga tidak akan tinggal diam. Artinya, partai politik lainnya secara aktif terus menerus memperbaharui strategi politik yang dimilikinya. Tentu saja apa yang dilakukan pesaing perlu dianalisis secara berkesinambung oleh suatu partai politik.⁷ Dalam masalah ini, Firmanzah melihat terdapat dua strategi politik yang perlu diperhatikan partai politik yaitu :

1. Strategi eksternal

Strategi yang ditunjukkan partai politik kepada pihak-pihak yang berada

Strategi pemberdayaan dalam struktur, interaksi, dan budaya organisasi.

Kedua strategi ini dilakukan secara simultan, dimana perbaikan internal organisasi berjalan seiring dengan perbaikan eksternal.

Penerapan strategi partai tidak terlepas dari sebuah identifikasi SWOT, dimana SWOT berfungsi untuk merespon secara efektif perubahan dalam lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal partai politik. Informasi yang menyediakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan sangat menentukan berbagai langkah untuk merumuskan perencanaan strategis untuk kemenangan pemilu. Kelemahan dalam mengidentifikasi SWOT berakibat pada tidak efektifnya perencanaan strategi yang dibuat partai.

b. Kampanye

Roger dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”. Merujuk pada definisi ini maka setiap aktifitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal yakni (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak

dalam kurun waktu tertentu dan (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Disamping ke-empat ciri pokok diatas, kampanye juga memiliki karakteristik lain, yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai, sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (*campaign maker*), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat.

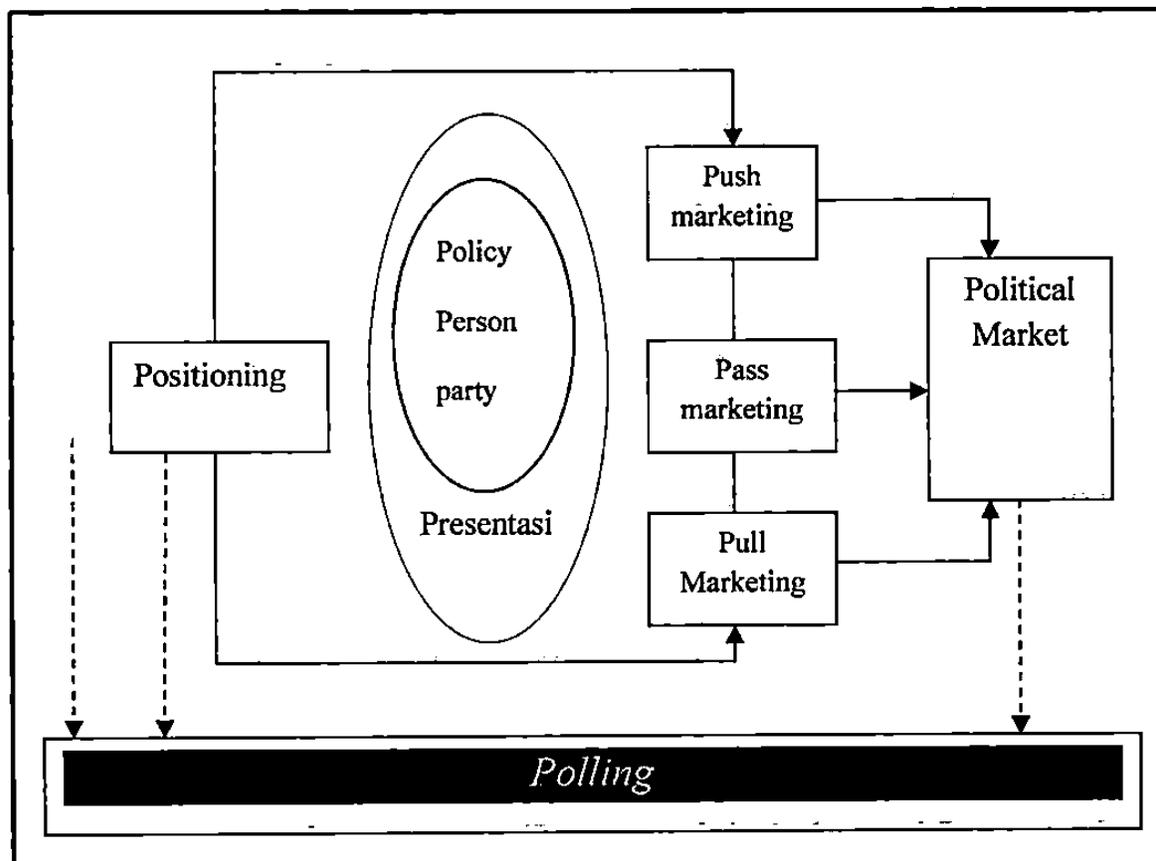
Pemilu merupakan fase terpenting bagi partai politik untuk merancang kampanye politik demi merebut perolehan suara sebanyak-banyaknya. Sehingga menerapkan sebuah strategi kampanye politik yang tepat adalah keniscayaan bagi partai politik. Marketing politik misalnya, sebuah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu didalam pikiran para pemilih. Merupakan strategi kampanye politik yang banyak dipakai partai politik dewasa ini. Di Amerika serikat para ahli pemasaran sangat terlibat dalam suksesi perebutan kursi parlemen maupun presiden.

Marketing politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu didalam pikiran para pemilih. Serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi

prilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis inilah yang menjadi output terpenting *political marketing* yang menentukan, pihak mana yang akan dicoblos pemilih.⁸

Berikut ini adalah pembentukan makna politis dengan pendekatan *political marketing* yang disederhanakan dengan model 9P⁹ (lihat bagan I.I) : *positioning, policy, person, party, presentation, push marketing, pull marketing, pass marketing, dan polling.*

Bagan 1.1
Sembilan Elemen Political Marketing



Positioning adalah strategi berkomunikasi untuk memasuki jendela otak pemilih agar sebuah kontestan mengandung arti tertentu yang mencerminkan keunggulan terhadap kontestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif. *Positioning* efektif harus dilakukan berdasarkan analisis terhadap faktor eksternal dan internal organisasi, serta preferensi segmen pemilih yang menjadi sasaran utama yang diketahui dari hasil segmentasi.

Positioning agar kredibel dan efektif harus dijabarkan dalam bauran produk politik yang meliputi 4P (*policy, person, party, presentation*). *Policy* adalah tawaran program kerja jika terpilih kelak. *Policy* merupakan solusi yang ditawarkan kontestan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan berdasarkan isu-isu yang dianggap penting oleh para pemilih. *Policy* yang efektif harus memenuhi tiga syarat yakni menarik perhatian, mudah terserap pemilih, dan *attributable*.

Person adalah kandidat legislative atau eksekutif yang akan dipilih melalui pemilu. Kualitas *person* dapat dilihat melalui tiga dimensi, yakni kualitas instrumental, dimensi simbolis, dan fenotip optis. Ketiga dimensi kualitas tersebut harus dikelola agar kandidat *attributable*.

Party dapat juga dilihat sebagai substansi produk politik. Partai mempunyai identitas utama, asset reputasi, dan identitas estetis. Ketiga hal

pilihannya. Oleh karena itu, dalam political marketing, unsur-unsur tersebut harus dikelola dengan baik.

Presentation adalah bagaimana ketiga substansi produk politik tersebut (*policy, person, party*) disajikan. Presentasi sangat penting karena dapat mempengaruhi makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih. *Presentation* disajikan dengan medium presentasi yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi objek fisik, orang dan event. Aspek penting lainnya dalam *presentation* adalah penggunaan konteks simbolis yang terdiri dari beberapa hal berikut ;

- 1) Simbol linguistic
- 2) Simbol optic
- 3) Simbol akustik
- 4) Simbol ruang dan waktu

Produk politik tersebut harus disampaikan kepada pasar politik yang meliputi media massa dan *influencer groups* sebagai pasar perantara, dan para pemilih sebagai pasar tujuan akhir. Penyampaian produk politik langsung kepada para pemilih tersebut disebut *push marketing*. Penyampaian produk politik dengan memanfaatkan media massa disebut *pull marketing*. Sedangkan

penyampaian produk politik kepada *influencer groups* disebut sebagai *pass marketing*.

Agar berjalan terkendali sesuai sasaran obyektif, proses *political marketing* perlu dipandu dengan *polling* dan berbagai aktifitas riset lainnya. Dalam sistem pemilu yang demokratis, riset merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah kontestan yang ingin menrapkan *political marketing* dengan efektif. Tanpa riset, para pemasar tahu arah yang akan dituju, sudah sampai mana, apa yang harus disampaikan, apa yang harus diubah, dan apa yang harus diteruskan.

1. Pelaku kampanye

Secara umum siapapun yang terlibat dalam menggagas, merancang, mengorganisasikan dan menyampaikan pesan dalam sebuah kegiatan kampanye dapat disebut sebagai pelaku kampanye.

2. Jenis-jenis kampanye

Caharles U. Larson membagi jenis kampanye kedalam tiga kategori dimana dilihat dari motivasi yang melatar belakangi diadakannya program kampanye yakni :

a. *Product-oriented* atau kampanye yang berorientasi pada produk

commercial campaign atau *corporate campaign*. Dimana motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan finansial.

b. *Candidate-oriented campaign* yakni kampanye yang berorientasi pada kandidat yang secara umum dimotivasi oleh hasrat untuk memperoleh kekuasaan politik. jenis kampanye ini bisa juga disebut sebagai kampanye politik (*political campaign*).

c. *Ideologically or cause oriented campaign* adalah jenis kampanye yang punya orintasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali berdimensi perubahan social. Bisa juga disebut *social change campaign*.

c. Partai politik :

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi social ekonomi.¹⁰

¹⁰ Ramlan Subakti, 1992 : *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana, Jakarta. Hal. 113-114

Teori yang pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini tidak hanya ditemui di wilayah atau bangsa yang tengah dijajah yang membentuk partai politik sebagai alat memobilisasi massa untuk memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga dapat ditemui dalam masyarakat Negara majudalam mana kelompok masyarakat yang kepentingannya kurang terwakilidalam sistem kepartaian yang ada membentuk partai sendiri seperti Partai Buruh di Inggris dan Australia, dan Partai Hijau di Jerman.

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti penambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan

partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, dan munculnya gerakan-gerakan populis.

Perubahan-perubahan itu menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi, dan aspirasi. Artinya, perubahan-perubahan mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah; menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa, dan mengakibatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik untuk mengatasi tiga permasalahan inilah partai politik dibentuk. Partai politik yang berakar kuat dalam masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk semacam pola hubungan kewenangan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik yang terbuka bagi setiap anggota masyarakat dan beranggotakan pelbagai unsur, jenis, agama, daerah, dan lapisan sosial ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai pengintegrasi bangsa.

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan Negara seperti birokratisasi, Pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi dan kemampuan peningkatan individu yang

politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi partai politik merupakan produk logis dari modernisasi social ekonomi. Dengan demikian teori ketiga memiliki kesamaan dengan teori kedua, bahwa partai politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan modernisasi. Perbedaan kedua teori ini terletak dalam proses pembentukannya. Teori kedua mengatakan perubahan menimbulkan tiga krisis dan partai politik dibentuk untuk mengatasi krisis, sedang teori ketiga mengatakan perubahan-perubahan itulah yang melahirkan kebutuhan adanya partai politik.

Menurut sejarah, sebenarnya fenomena partai politik adalah perkembangan terkini dari pergulatan politik. Munculnya partai politik dapat ditemukan di awal abad ke-19 (Ostrogorski ; O'gorman dan Fraser). Partai politik yang dimaksudkan disini tentu saja memiliki pengertian yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pemikiran politik yang telah lama dimulai sejak peradaban Yunani kuno. Demikian juga dengan yang mungkin terjadi dalam interaksi politik jauh sebelum itu, pada kebudayaan Cina Kuno, Hindu-India, dan Babylonia. Konflik politik untuk berkuasa memang sudah dapat kita temukan pada banyak literatur tentang peradaban zaman-zaman ini, tapi tentu saja perpolitikan yang ada pada saat itu, dan dalam kebudayaan itu, memiliki wajah yang berbeda dengan perpolitikan zaman ini.

Bentuk partai politik yang kita kenal pada saat ini muncul dari

kenyataan bahwa kepentingan politik kolektif membutuhkan suatu sistem organisasi-birokrasi yang menjamin efisiensi dan efektifitas dalam perjuangan politik. Kepentingan dan perjuangan politik perlu diorganisasi dan tidak dapat dibiarkan tercerai-berai tanpa organisasi. Semakin terangkai semangat kolektifnya, semakin meningkat pula posisi tawar menawar terhadap lawan politik. Pergorganisiran kepentingan politik inilah yang melahirkan organisasi partai politik. Organisasi partai politik tidak hanya bertujuan untuk mengorganisasi beragam ide, gagasan, kepentingan, dan tujuan politik yang sama. Kehadiran partai politik juga sangat terkait dengan sistem parlemen.¹¹

Partai politik modern adalah partai yang mampu berfungsi sebagai saluran masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Indikasi parpol modern adalah adanya kongruensi antara *platform* partai politik dengan kebijakan publik. Terlepas dari menang kalah dalam pemilu, sebuah parpol modern tetap berfungsi sebagai representasi dari aspirasi masyarakat. Karena bagi parpol yang bukan mayoritas, mendapatkan kursi dalam pemerintahan atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali, suatu parpol modern akan memosisikan diri sebagai oposisi pemerintah dan tetap memegang kontrol terhadap kebijakan publik yang diterbitkan pemerintah.¹²

¹¹ Firmanzah, *Op. Cit.* hal. 55-56

¹² Koirudin, 2004 : *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi ; Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal . 147

Momen pemilu biasanya partai politik mulai muncul dengan beragam tawaran dan berbagai embel-embel yang berusaha menarik perhatian dan hati masyarakat, dengan harapan masyarakat mau mendukung partai atau kandidat yang diusung pada pemilu nanti. Partai politik juga merupakan kendaraan politik yang digunakan oleh sebuah individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan berusaha menempatkan wakil-wakilnya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan yang dikeluarkan.

Mendudukan partai politik sebagai organisasi yang mampu mengantarkan individu untuk berkuasa telah mereduksi arti penting partai politik di Indonesia. Partai politik yang tadinya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak ide dan gagasan baru untuk mensejahterakan rakyat telah berubah menjadi pertempuran egoisitas individu untuk berkuasa. Partai politik yang tadinya menjadi tumpuan harapan besar untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa berkualitas telah berubah menjadi arena "oportunis" kalangan eksternal yang menunggu untuk dipinang dan dicalonkan menjadi legislatif atau eksekutif. Tidak heran kalau karenanya *image* partai politik dimata publik menjadi negatif. Selama ini telah terjadi "dominasi individu-kolektif" yang dilakukan para politisi terhadap partai politik. Maka benar apa yang dikatakan Aldrich : "*the major political party is the creature of the politicians, the ambitious office seeker and the office*

ignored the political party when doing so....the political party is thus an 'endogenous' institution-an institution shaped by these political actor ".

Bahwa partai politik memang didirikan oleh politisi untuk mencapai tujuan politik. Namun, ketika telah dibentuk, sesungguhnya partai politik perlu menjadi dirinya sendiri. Secara organisasi, partai politik memiliki visi, misi, tujuan jangka panjang dan strategi. Disamping itu, partai politik dilengkapi pula dengan segenap peraturan dan ketentuan yang dapat menjamin tumbuhnya perilaku-prilaku politik tertentu pada diri para politisi yang tergabung didalamnya. Lebih lanjut lagi, partai politik juga sekaligus menjamin dinamika kepentingan politikus yang menjadi anggotanya.¹³

Namun, bukan berarti partai politik harus selalu tunduk pada kepentingan politik masing-masing politisinya. Ketika didirikan untuk suatu tujuan jangka panjang, partai politik justru harus merupakan suatu *'living-organism'* yang terus menerus melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Partai politik memang perlu memfasilitasi kepentingan politisi, tapi pasti bukan sekedar alat yang bisa dengan begitu saja dimanipulasi politisi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Eksploitasi besar-besaran partai politik hanya terjadi kalau ada individu-individu yang dianggap 'super' dan menjadi 'raise-d'ere partai politik bersangkutan. Resikonya yang paling besar adalah ketika organisasi partai politik tersebut ditunggal si individu 'super'. Konflik

dan perpecahan pun tak pelak lagi akan terjadi sehingga dapat merusak kredibilitas partai politik tersebut dimata public. Selain itu, dominasi individu terhadap partai politik telah menciptakan 'kutu loncat politik' yang bisa berpindah-pindah dari satu partai politik kepartai politik lain tanpa hambatan apapun.¹⁴

(i) Definisi partai politik

Banyak para ahli mendefinisikan partai politik, diantaranya :

a). Menurut Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

b). Menurut Sigmund Neumann

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

c). Menurut Giovanni Sartori

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

d). Menurut Mark N. Hagopian

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi beentuk dan kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi dalam pemilihan.

e) Menurut Rusadi Kantaprawira

Partai politik adalah organisasi-organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih baik pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa.¹⁵

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Partai politik dapat didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa

pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik menurut Max Weber sangat berkembang pesat di abad ke-19 karena didukung oleh legitimasi legal rasional. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu organisasi yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain

(ii) Fungsi partai politik :

Sejak berlangsungnya pemilu 1999 sampai saat ini, banyak sekali kalangan yang merasa tidak puas atas hasil proses politik yang dicapai. Hal ini disebabkan karena desas-desus tentang perilaku politik para politisi diparlemen sangatlah tidak mengesankan untuk didengar. Sebagian orang memaklumi bahwa hal ini disebabkan karena memang perubahan politik di Indonesia terjadi begitu cepat, sehingga manajemen perubahan (*managemen of change*) berjalan lebih lambat dibanding perubahan itu sendiri. Yang muncul adalah keterkejutan budaya (*shock culture*) dari mereka yang merasakan betul dampak dari perubahan tersebut. Mereka

“ ... dan sebaliknya akan menjadi

Partai politik merupakan salah satu pelaku politik untuk menciptakan lembaga-lembaga politik tetap berjalan, kemana arah bangsa dan Negara hendak diarahkan, disini partai politik punya peran besar bagi kelangsungan suatu Negara.

Kekecewaan masyarakat akan sikap partai politik yang hanya muncul pada momen suksesi pemilu, serta tenggelam ketika tidak ada suksesi bersama tenggelamnya janji-janji politik yang diobral semasa kampanye. Ini memberikan pertanyaan besar bagi kemampuan partai politik menjalankan fungsi-fungsinya.

Ada banyak pendapat yang mengemukakan akan fungsi partai politik, diantaranya adalah :

Monte Palmer, yang mengatakan fungsi partai politik adalah menyediakan dukungan basis massa yang stabil, sarana integrasi dan mobilisasi, memelihara kelangsungan kehidupan politik

Roy C Macridis, mengatakan fungsi parpol adalah sebagai representasi (perwakilan), artikulasi kepentingan, ekspresi dari parpol untuk kepentingan yang diwakilinya, konvensi, agregasi ; melakukan transformasi dari proses *in-put* menjadi *out-put*, integrasi, persuasi, koordinasi, seleksi dan pemilihan pemimpin, pertimbangan dan penyusunan

Mengacu dari Ramlan subakti menguraikan fungsi Partai Politik sebagai berikut :

1) Artikulasi kepentingan

Adalah suatu proses peng *in-putan* berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

Dalam hal keputusan, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang menolong masyarakat dan juga terkadang menyulitkan masyarakat. Ini semua tidak terlepas dari artikulasi kepentingan segmen masyarakat.

2) Agregasi kepentingan

Merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakann publik. Indonesia adalah bangsa yang heterogen, dimana banyak suku, ras dan agama sehingga perlunya penjaringan aspirasi yang dapat melindungi dan menguntungkan semua pihak masyarakat. Ketidakmampuan dalam memilih kebijakan yang tepat berakibat pada ketidak puasan kelompok masyarakat yang

3) Sosialisasi politik

Suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh Negara. Seperti halnya rendahnya kualitas dari perilaku pemilih ini sangat paralel dengan intensitas fungsi sosialisasi politik oleh partai politik di Indonesia, sosialisasi yang terjadi selama ini masih terfragmentasi. Partai politik gencar melakukan sosialisasi dan transformasi politik masyarakat hanya ketika ada kepentingan seperti hajatan-hajatan politik, sedangkan ketika tidak ada kepentingan tersebut maka sosialisasi terhenti.

4) Rekrutmen politik

Rekrutmen politik sangat berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap partai politik diharapkan mempunyai sistem dan prosedur tersendiri untuk membentuk kader-kader berkualitas. Sehingga partai dapat memunculkan calon-calon

yang cakap dan kampabel, sehingga bukan hanya berorientasi jabatan politik saja.

Partai politik sebenarnya punya tanggung jawab untuk terciptanya kaderisasi kepemimpinan dalam jabatan-jabatan politik mengingat sistem yang mengharuskan bahwa seseorang yang hendak berkompetisi dalam jabatan politik tertentu harus menggunakan partai sebagai kendaraan politik. Partai politik juga berungsi untuk mengamankan posisi dalam jabatan dari goncangan-goncangan dan tekanan politik.

5) Komunikasi politik

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, yakni mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Segala bentuk kebijakan ataupun informasi politik partai mempunyai peran dalam melakukan komunikasi politik ini diharapkan untuk meredam tingkat konflik dalam masyarakat. Komunikasi politik juga memberikan sebuah informasi politik agar masyarakat paham akan sebuah keputusan atau informasi politik yang berkembang.

Di dalam masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam

individu maupun kelompok akan samar dan tak terlihat jika mengadopsi demi kepentingan bersama. Mengadopsi atau penggabungan kepentingan bersama disebut (*interest aggregation*). Kemudian penggabungan aspirasi tersebut diformulasikan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan *interest articulation* (perumusan kepentingan) .

(iii) Sistem kepartaian

Dalam kehidupan politik ketatanegaraan suatu Negara, pada prinsipnya dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu ¹⁷;

- a. Sistem partai tunggal (*the single party system*). Istilah ini dipergunakan untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik dalam suatu Negara, maupun untuk partai politik yang mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai politik lainnya. Namun demikian-oleh para sarjana –dianggap merupakan bentuk penyangkalan diri (*contradiction in terminis*), mengingat dalam pengertian system itu sendiri akan selalu mengandung lebih dari satu unsur atau komponen. Kecenderungan untuk mengambil sistem partai tunggal disebabkan karena pimpinan

¹⁷ B. Restu Cipto Handoyo. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Pemilu Legislatif dan Sistem Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, hal 228-229.

Negara-negara baru sering dihadapkan masalah bagaimana mengintegrasikan beberapa golongan, daerah suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bila keanekaragaman sosial budaya ini dibiarkan tumbuh dan berkembang, besar kemungkinan akan terjadi gejolak-gejolak sosial yang menghambat usaha-usaha pembangunan dan menimbulkan disintegrasi.

- b. Sistem dua partai (*two party system*). Menurut Maurice Duverger, sistem ini adalah khas Anglo Saxon (*Amerika, Filipina*). Didalam sistem ini partai-partai politik dengan jelas dibagi kedalam partai politik yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum).
- c. Sistem banyak partai (*multy party system*). Pada umumnya sistem kepartaian semacam ini muncul karena adanya keanekaragaman sosial budaya dan politik yang terdapat didalam suatu Negara.

d. Pemilihan umum :

Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi Negara demokrasi. Sebagai sistem demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistik dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi, yang populis, adil dan beradab, handal, bukan tanpa kelemahan. Rakyat tak terbantahnya

tesis-tesis demokrasi sehingga hampir semua penguasa otoriter dan tiran menyebut sistem yang digunakannya sebagai sistem demokrasi.¹⁸

Disampaing merupakan prasyarat demokrasi, pemilu juga menjadi pintu masuk atau tahap awal dari proses pelebagaan demokrasi. Perjalanan panjang Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu sejak tahun 1955 memberi pelajaran berharga untuk menata kehidupan bangsa kedepan menuju yang lebih baik. Bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pemilu 2009 dengan format berbeda dari sebelumnya, sehingga azas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terlaksana secara benar, konsekuen, dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, moral maupun politis.

Perlambangan demokrasi ialah pemilihan umum yang bebas dan pemberian suara yang rahasia. Hal ini benar-benar dapat dimengerti, karena hak untuk memberi suara secara bermakna dan bebas dari paksaan merupakan metafora untuk sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum. Tetapi demokrasi tidaklah “bersemayam” dalam pemilu-pemilu.¹⁹

¹⁸ Joko J. Prihatmoko Moesafa, 2008 : *Menang Pemilu Ditengah Oligarki Partai* : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 43-44.

¹⁹ Budhi Munawar Rahman, 2006 : *Insklopedi Nurcholis Madjid* : Mizan, hal.512

menentukan alokasi kursi yang akan diberikan kepada masing-masing partai yang bersaing.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut "*distric magnitude*", yaitu jumlah wakil rakyat yang dipilih dalam sebuah distrik. Besar sebuah distrik dapat berbeda satu sama lain karena jumlah perbedaan penduduk. Besaran kursi yang diperebutkan bagi sebuah distrik (*distric magnitude*) merupakan sesuatu yang sangat penting, dikarenakan akan menentukan nasib-nasib partai politik dikemudian hari. Ada Negara yang menggunakan wilayah Negara sebagai sebuah distrik, seperti Indonesia. Sehingga memungkinkan partai kecil untuk terjamin mendapatkan kursi. Tetapi, adapula Negara-negara yang membagi wilayah Negara kedalam distrik, dengan besaran (*magnitude*) yang berbeda. Ada satu distrik yang menyediakan lima sampai enam kursi untuk diperebutkan. Sementara itu, ada pula distrik yang hanya menyediakan satu atau dua kursi. Kalangan ilmuwan politik menyatakan, bahwa semakin besar *magnitude* sebuah distrik, akan semakin besar partai kecil akan terlindungi. Sebaliknya, kalau *distric magnitudenya* kecil, maka partai yang memperoleh 10% dari total suara pun tidak akan memiliki peluang.

2. Pemilu legislatif 2009

Pemilu merupakan momen suksesi untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai bentuk pengakuan akan kedaulatan rakyat, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”,²¹ ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka dari itu segala wewenang yang ada di dalam negara, yang menentukan segala corak, cara pemerintahan serta tujuan negara adalah dan dilakukan oleh rakyat. Akan tetapi, karena rakyat merupakan entitas yang sangat kompleks dan juga sangat luas jangkauan/wilayahnya yang punya keterkaitan erat dengan corak budaya, kultur, agama dan lain sebagainya maka kedaulatan tersebut diwakilkan oleh beberapa wakil rakyat yang disebut sistem perwakilan, yang nantinya dijalankan oleh parlemen ataukah MPR, DPR, Senat House of commons dan lainnya.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Surakarta: Pustaka Mandiri Surakarta

Oleh sebab itu bagaimana menyiapkan dan mendudukkan orang-orang yang nantinya duduk di DPR haruslah benar-benar yang bisa menjadi representasi rakyat, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat ini sangatlah penting.

Oleh sebab itu untuk menempatkan perwakilan yang nantinya duduk dilembaga legislatif maka diadakannya pemilu legislatif yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat 1 UUD 45), dimana rakyat diberi keleluasaan untuk menempatkan wakil-wakilnya sebagai representasi yang mengakomodasi kepentingan-kepentingannya. Artinya kedaulatan milik rakyat yang mencoba menyerahkan kepada rakyat untuk menempatkan wakil yang punya klasifikasi sebagai anggota legislatif.

Sedangkan pemilu legislatif adalah suatu sarana pelaksanaan demokrasi untuk memilih anggota legislatif baik anggota DPR RI, DPD dan DPRD, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota diselenggarakan oleh KPU.

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemilu legislatif 2009, dan ada sedikit perbedaan dibanding pemilu 2004 yang lalu. Kalau kita lihat garis besar RUU tentang Pemilu yang sudah disepakati DPR untuk ditetapkan menjadi UU tentang Pemilu (Legislatif)²² yakni UU No 10 tahun 2008 yaitu ;

1. Penamaan sistem pemilu yang digunakan UU ini adalah sistem proporsional terbuka (Pasal 5 ayat (1). Namun demikian, terdapat ketentuan bahwa “setiap calon terpilih ditentukan dengan perolehan suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP bagi setiap calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/kota. Apabila calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % dari BPP di satu partai politik melebihi jumlah kursi yang diperoleh partai politik tersebut di satu daerah pemilihan maka di kembalikan pada nomor urut (Pasal 214)”. Karena itu sistem

pemilunya lebih dikenal sebagai sistem proporsional terbuka terbatas.

2. Selain *Electoral Threshold* (ET), diperkenalkan juga konsep *Parliamentary Threshold* (PT). Angka *Electoral Threshold* ditetapkan sebesar 3% yang berlaku untuk Pemilu 2009 dengan aturan peralihan dikecualikan bagi partai yang telah memiliki kursi di DPR (Pasal 315). Angka *Parliamentary Threshold* sebesar 2,5% untuk tahun 2009 (Pasal 202 ayat (1))
3. Jumlah bakal calon di dalam 1 daerah pemilihan sejumlah 120% (seratus dua puluh per seratus) dari jumlah kursi yang ada dalam setiap dapil (Pasal 54). Alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi (Pasal 22).
4. UU ini menyatakan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas efisien dan efektif selain asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 (Pasal 2)
5. Teknis pemilu yang dipermudah: (a) kemudahan yang diberikan adalah WNI yang memiliki hak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tidak memerlukan kartu pemilih dalam menggunakan hak memilihnya tetapi cukup dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya serta paspor bagi WNI yang berada di luar negeri (Pasal 19 dan 20); (b) Cara

memberikan suara dilakukan dengan cara memberi tanda 1 (satu) kali pada surat suara dengan dasar memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam pelaksanaan pemilu (Pasal 153); (c) Jumlah pemilih tetap TPS paling banyak 500 pemilih. Hal ini akan lebih meningkatkan efisiensi biaya pemilu (Pasal 150).

6. Keterwakilan perempuan dengan ketentuan dalam daftar calon yang diajukan parpol memuat 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, dalam setiap 3 (tiga) nama calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) calon perempuan (Pasal 53 dan 55)
7. Jumlah Anggota DPR 560 kursi (Pasal 21). Jumlah Anggota untuk DPRD provinsi tetap yakni paling sedikit 35 dan paling banyak 100 (Pasal 23 ayat (1)). Sedangkan klasifikasi bagi kursi DPRD kabupaten/kota yang berpenduduk lebih satu juta menjadi 50 kursi (Pasal 26 ayat (1)). Daerah pemilihan DPRD tidak berubah, yakni daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan/gabungan kecamatan; dan DPRD Propinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota (pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1)).
8. Adanya kesempatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan

kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) kali untuk memperoleh masukan dan tanggapan sebelum disusun DPT (Pasal 43). Setelah DPT ditetapkan, masih dimungkinkan ada tambahan tetapi tidak merubah jumlah DPT secara nasional, bagi yang melakukan perpindahan pada saat pemungutan suara, sakit, tugas, atau sebab lain yang menyebabkan pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS bersangkutan (Pasal 40) KPU kab/kota harus memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada parpol peserta pemilu di tingkat kab/kota (Pasal 38 ayat (5)).

9. Penyelesaian seketika terhadap kesalahan dan kekeliruan pelaksanaan pemilu. Penyelesaian terhadap pelanggaran ketentuan pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan pearadilan umum dengan hakim khusus. Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional (Pasal 252, 254, 257 ayat (1)).

10. Penghitungan sisa suara dilakukan dengan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah

memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari BPP DPR (Pasal 205 ayat (4)).

11. Penghitungan sisa suara: (a) Apabila masih terdapat sisa kursi, maka dilakukan penghitungan tahap ketiga, dengan cara memberikan kursi kepada parpol yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. (Pasal 205 ayat (7)); (b) Apabila masih terdapat sisa kursi, penetapan perolehan kursi parpol peserta pemilu dilakukan dengan membagikan sisa kursi kepada parpol peserta pemilu di provinsi satu demi satu berturut turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak (Pasal 206)

12. Aturan *survey* dan penghitungan cepat: (a) hasil *survey* yang berkaitan dengan preferensi terhadap peserta pemilu tidak boleh diumumkan hasilnya dalam masa tenang (Pasal 245 ayat (2)); (b) penghitungan cepat dilakukan dengan memberi tahukan metode yang digunakan serta perlu penegasan hasilnya bukan hasil resmi dari penyelenggaraan pemilu dan pengumumannya baru dapat diumumkan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara (Pasal 245 ayat (3)).

Adapun cara penghitungan perolehan kursi DPR pada pemilu 2009²³ berdasarkan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemilu legislatif 2009 yaitu :

Penentuan perolehan Kursi DPR untuk Pemilu 2009 berbeda dengan Pemilu 2004, hal ini disebabkan adanya ketentuan *Parliament Threshold* (PT). Pada Pemilu 2009, parpol yang mendapatkan kursi DPR adalah parpol yang memperoleh PT sebesar 2,5 %; yakni perolehan suara sah parpol tersebut, minimal mencapai 2,5 persen dari total suara sah pemilih.

Misalkan saja jumlah keseluruhan suara sah pemilih pada pemilu 2009 adalah 100 juta suara. Bila suatu Parpol tidak mencapai perolehan suara minimal 2,5 juta suara (suara nasional), maka parpol tersebut tidak akan memperoleh kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) manapun. Karena memang parpol tersebut tidak akan dilibatkan lagi dalam penghitungan kursi DPR.

Uraian diatas, jelas diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, bunyinya sebagai berikut :

Pasal 202

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Pasal 203

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan.
- 2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1)

- 3) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.

Untuk Penghitungan kursi DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat 2 dan 3 diatas, maka dilakukan inventarisasi 34 parpol peserta Pemilu 2009, yakni parpol yang memenuhi PT (kita sebut : Parpol PT), dan parpol yang tidak memenuhi PT (Parpol Non PT). Dari hasil inventarisasi ini maka didapatkan penentuan BPP disuatu dapil.

Adapun tahapan menuju penentuan BPP disuatu dapil adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Suara Sah

Suara sah adalah suara sah Parpol PT dikurangi Parpol Non PT.

Misal diperoleh sejumlah x suara, maka x suara tersebutlah yang

diikuti sebagai Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu

BPP didapat dengan membagi Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi di suatu dapil. Misal untuk dapil Jabar I (meliputi TPS se Kota Bandung & Kota Cimahi) ditetapkan kuota 7 Kursi DPR (lampiran UU Pemilu), maka BPP di Jabar I adalah $x/7$.

3. Setelah angka BPP disuatu dapil diperoleh, maka selanjutnya ditentukan jumlah kursi yang didapat oleh masing-masing Parpol PT didapil tersebut.

Penetapan perolehan kursi DPR diatur dalam Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209 , Pasal 210, dan Pasal 211. Penetapan perolehan kursi tersebut terdiri atas beberapa tahap (bila masih terdapat sisa kursi), yakni :

- a. Tahap I (pasal 207 ayat 3)

Dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP

- b. Tahap II (pasal 207 ayat 4)

Dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara

c. Tahap III (pasal 207 ayat 5)

Dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru.

d. Tahap IV (pasal 208)

Dengan cara membagikan jumlah sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai habis.

e. Tahap V (pasal 209)

Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dan sisa suara partai politik peserta pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang mempunyai akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan

Catatan : Tahapan sebagaimana Poin c,d, dan e hanya dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi.

Selanjutnya ditentukan Daftar Caleg (Partai PT). Adapun

calon legislatif (calon) yang terpilih dalam suatu pemilu adalah calon

yang memenuhi BPP, atau yang memenuhi 30 % dari BPP, dengan ketentuan (Pasal 214 ayat 1) sebagai berikut :

- a. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya **30% BPP** (misal kita sebut : **caleg 30%**)
- b. Bila jumlah caleg 30% **lebih banyak** dari jumlah kursi yang diperoleh parpol tersebut, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil
- c. Bila terdapat dua caleg 30% BPP, dengan perolehan suara yang sama, maka calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil
- d. Bila caleg 30% jumlahnya **kurang** dari jumlah kursi yang diperoleh parpol, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut
- e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (kita sebut : **parpol non caleg 30%**), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut

Adapun cara perhitungan perolehan kursi pemilu DPRD (Provinsi dan Kabupaten/kota) Pemilu 2009²⁴ yakni : sebagaimana Pemilu DPR RI, caleg terpilih adalah caleg yang berasal dari parpol-
nomor yang lebih 2,5% PT (Parliament Threshold). Ketentuan 2,5%

PT ini tidak berlaku untuk Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota), dengan demikian kompetisi memperebutkan kursi DPRD akan menjadi lebih terbuka bagi caleg yang berasal dari partai kecil maupun partai baru. Ini berarti Pemilu DPRD menjadi semakin kompetitif diantara para caleg yang berasal dari ke-38 Parpol (kecuali di NAD, ditambah 6 parpol lokal).

- 1) Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS)
- 2) Partai Daulat Aceh (PDA)
- 3) Partai Suara Independet Rakyat Aceh (SIRA)
- 4) Partai Rakyat Aceh (PRA)
- 5) Partai Aceh
- 6) Partai Bersatu Aceh (PBA)

Perolehan suara pemilu legislatif terdiri atas perolehan suara parpol dan perolehan suara caleg. Artinya di suatu daerah pemilihan (dapil) akan terdapat perolehan suara parpol yang berasal dari perolehan suara masing-masing caleg parpol tersebut. **Bilangan pembagi pemilihan (BPP)**, secara umum dapat diartikan sebagai **harga satu buah kursi**. BPP suatu dapil diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan alokasi jumlah kursi di suatu dapil

Untuk menentukan perolehan kursi DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), maka terlebih dahulu diketahui jumlah suara per parpol, selanjutnya kursi dibagikan kepada parpol yang terbagi atas BPP; yaitu parpol yang mencapai atau melebihi BPP (kita sebut saja **Parpol BPP**). Bila terdapat **sisa kursi**, maka sisa kursi akan dihabiskan dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol-parpol (baik parpol BPP maupun **parpol non BPP**) dengan mengurutkan suara atau sisa suara parpol - parpol tersebut berdasarkan sistem rangking.

Dengan demikian, tahapan **perhitungan perolehan kursi parpol** pada Pemilu DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni **sistem BPP** (Tahap I) dan **sistem rangking** (Tahap II, bila terdapat sisa kursi).

Contoh sederhana :_Misalkan di dapil A, Berdasarkan Penetapan KPUD alokasi jumlah kursi sebanyak 10 kursi dan jumlah Daftar Pemilih (DP4) 1.200.000 orang. Pertanyaan : Berapa BPP-nya? dan bagaimana pembagian kursinya ?

Bila pada hari pemilihan yang datang ke TPS hanyalah 1.050.000 orang, dan jumlah suara yang dinyatakan sah sebesar 1.000.000, jumlah suara tidak sah 50.000 (karena salah dalam hal

pencentangan, dll). maka BPP-nya adalah 1.000.000 (suara sah) dibagi 10 (kursi), sehingga diperolehlah besaran **BPP sebesar 100.000** suara.

Selanjutnya kursi terlebih dahulu dialokasikan kepada parpol yang mencapai perolehan suara 100.000 keatas (**Parpol BPP**). Katakanlah yang tergolong Parpol BPP hanya 6 dari 38 parpol, serta masing-masing memperoleh 1 Kursi. Sehingga terdapat sisa 4 Kursi, selanjutnya sisa kursi akan dibagi habis kepada parpol - parpol (**Baik parpol BPP maupun Parpol Non BPP**) berdasarkan urutan perolehan suara terbesar (**sistem ranking**).

Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut.

Perubahan-perubahan dalam sistem pemilu yang menjadi perdebatan panjang dikarenakan, bentuk kesadaran masrakat Indonesia yang semakin tinggi akan pentingnya mendapatkan anggota legislatif

legislator juga mampu memberikan aspirasi yang ia emban, sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan istilah yang ada dalam pokok masalah penelitian. Adapun definisi konsepsional pada penulisan ini adalah :

1. *Strategi* adalah rencana untuk tindakan.
2. *Kampanye* adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu
3. *Pemilihan umum* adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat dan karenanya bagi suatu Negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.
4. *Partai politik* didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para

pendukungnya (*politisi*) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah berisi operasionalisasi variabel sampai indikator yang merupakan salah satu unsur sebagai petunjuk pelaksanaan mengukur variable. Definisi Operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Strategi Internal

Strategi pemberdayaan dalam struktur, interaksi, dan budaya organisasi, dan optimalisasi sumber daya partai. Meliputi :

a. Mesin partai

- a) Konsolidasi internal : memainkan fungsi struktur : melalui pembagian tugas yang jelas untu memudahkan koordinasi.
- b) Penyiapan/penggemblengan kader
- c) Penggalangan dana
- d) Sistem rekrutmen calon Anggota legislatif :

b. Kandidat/Anggota Legislatif

Serta kemampuan memaksimalkan Sumber daya politik dalam

2. Strategi Eksternal

Strategi yang ditujukan partai atau Caleg kepada pihak-pihak yang berada diluar lingkungan partai atau Caleg, meliputi :

- a. Policy : dalam bentuk tawaran program kerja jika terpilih kelak dan solusi yang ditawarkan kontestan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan berdasarkan isu-isu yang dianggap penting oleh para pemilih
- b. Meliputi, citra dan popularitas kandidat di mata pemilih, performance, kompetensi, pesona fisik maupun “aura” yang dipancarkan oleh kandidat yang mempengaruhi pasar politik yang terdiri atas tiga bagian yaitu : pemilih, kelompok berpengaruh (*influencer groups*) dan media massa.
- c. Kampanye politik meliputi : Bentuk-bentuk kampanye, metode kampanye, dan instrumen kampanye yang digunakan.

Dimana ketiga hal diatas, dijalankan oleh struktur partai dan juga para Caleg yang ikut dalam kompetisi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Tidak

boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.²⁵

Bahwa dalam penelitian ini penulis mencoba melihat dan mengamati bagaimana Partai Amanat Nasional (PAN) membaca peluang dan menerapkan suatu strategi kampanye yang dimainkan, dalam mendulang suara pada pemilu legislatif 2009. Dengan hasil deskriptif (kata-kata/penjelasan) yang penulis coba bahas melalui data-data yang diperoleh dari data primer : wawancara, dan data skunder : literature, hasil penelitian ilmiah, artikel-artikel, Koran dan media cetak dan elektronik lainnya.

2. Unit Analisa Data

Unit analisa data dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat data-data dan informasi ini tersedia Di kantor DPW PAN DIY.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang didapat dari sebuah keterangan pihak-pihak yang terkait dan berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel-artikel ilmiah, catatan-catatan, Koran dan dokumen lainnya yang punya keterkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta dalam penulisan penelitian ini. Adapun dalam pengumpulan data penulisan ini kami lakukan berbagai cara yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *yang diwawancarai* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami massa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan ;
memerifikasi sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa

yang akan datang ; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Dalam penelitian ini ada beberapa responden yang kami perlukan guna mendapat informasi tentang strategi kampanye politik PAN di DIY pada pemilu 2009. Adapun responden yang kami wawancarai yaitu :

TABEL 1.3
DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA (INTERVIEW)

NO.	Jenis Responden	Jumlah
1.	Pengurus DPW PAN DIY	2 orang
2.	Tim Ad-Hoc Pemenangan Pemilu	2 orang
3.	Caleg PAN pemilu 2009	3 orang
Jumlah 6 orang		7 Responden

- b. Literatur adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi mengenai hal-hal atau variable dalam penulisan penelitian ini melalui berbagai literatur, peraturan perundang-

undangan, dokumen, dokumen, catatan rapat, catatan harian, dan lain

- c. Observasi adalah pengamatan setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Dimana observasi disini diartikan lebih sempit, yakni melakukan penglihatan dengan panca indra dengan tidak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada instansi terkait yakni DPW PAN D.I Yogyakarta.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis pada terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara – cara berfikir formal dan argumentatif.²⁶